Transformasi *Noise* menjadi *Voice*:
Politik Keterbukaan Pengetahuan dalam
Kekinian Diskursus *Evidence Based Policy* di Indonesia

Usulan Penelitian untuk Disertasi S-3
Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

Diajukan oleh:
Cahyo Seftyono 18/435554/SMU/01219

Promotor: Co Promotor:
Prof. Dr. Purwo Santoso, MA Prof. Dr. Muhadjir Muhammad Darwin, MPA
Dr. Agus Heruanto Hadna, MSi

Usulan Penelitian

Transformasi *Noise* menjadi *Voice*:
Politik Keterbukaan Pengetahuan dalam
Kekinian Diskursus *Evidence Based Policy* di Indonesia

diajukan oleh
Cahyo Seftyono
18/435554/SMU/01219

telah disetujui oleh :

Promotor,

Prof. Purwo Santoso, PhD
Ko-Promotor,

tanggal.....

Prof. Dr. Muhadjir Muhammad Darwin, MPA
Ko-Promotor,

tanggal.....

Dr. Agus Heruanto Hadna, MSi

tanggal.....

Daftar Isi

Usulan Penelitian	2
Daftar Isi	3
Bab I	4
Pendahuluan: Politik Pengetahuan dan Kebijakan di Indonesia.....	4
<i>Mengubah Noise menjadi Voice</i>	5
 Bab II	7
Metodologi Riset: Strategi dan Sasaran Kebaruan.....	7
<i>Metode Eksplorasi</i>	11
<i>Riset Aksi Partisipasi (RAP)</i>	12
 Bab III	14
Kajian Pustaka: Kelindan Evidence Based Policy dan Kontekstualisasi di Indonesia.....	14
<i>Kebuntuan Gagasan: Valley of Death, Brokering Pengetahuan dan Bias yang Eksis</i>	14
<i>Diskursus Evidence Based Policy dan Partisipasi Saintifik Publik</i>	16
<i>Kontekstualisasi Indonesia</i>	18
 Alur Berpikir	20
Pembabagan Disertasi	21
Referensi	21
Kemajuan Studi	23

Bab I

Pendahuluan: Politik Pengetahuan dan Kebijakan di Indonesia

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab apakah kebijakan berbasis bukti atau *evidence based policy* itu menjadi proses yang berjalan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Keterlibatan berbagai stakeholder mulai dari pakar, tenaga ahli, konsultan, *think tank* selama ini dijadikan justifikasi pelibatan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan. Namun demikian, apakah yang sedang terjadi dalam pelibatan mereka di dalam jargon *evidence based policy* tersebut. Apakah mereka benar-benar merepresentasi pengetahuan, ataukah hanya menyuarakan kepentingan yang sudah disainstifikasi. Kebutuhan akan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan akan dijawab dalam penelitian ini dengan merujuk pada beberapa kolaborasi dalam proses kebijakan. Keterlibatan aktor, sesungguhnya adalah salah satu bagian dari keterlibatan pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang berkepentingan pada satu kebijakan merupakan pondasinya. Sehingga publik non pakar yang terpapar sains bisa ikut andil dalam mengedukasi masyarakat sekaligus memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

27 Februari 2020 lalu Tim Sains Terbuka Indonesia merilis visi dan misi dalam komunitas. Sains Terbuka bukanlah organisasi, meskipun dalam konteks internasional, mereka mendapat label organisasi dikarenakan memiliki lembaga yang melekat kepada institusi perguruan tinggi. Penggunaan *terma* organisasi dalam Tim Sains Terbuka di Indonesia tidaklah pas. Sains Terbuka bukan organisasi, dalam artian tanpa struktur hierarki dan juga bukan sebagaimana umumnya kita memaknai lembaga. Sains Terbuka adalah kumpulan gagasan, nilai perjuangan, yang basisnya adalah kemunculan riset yang kredibel dan berkualitas. Tidak sekadar dari kebutuhan akademik, namun juga dampaknya terhadap kebijakan publik.

Gerakan keterbukaan sains di Indonesia ini berbeda. Melalui publisitas visi misinya, mereka menempatkan *value* gerakan sebagai bagian penting dalam komunitas. Tidak berfokus pada *positioning* mereka terhadap negara dan pemodal/pendonor. Melainkan bagaimana tujuan kehadiran mereka dalam menciptakan iklim riset yang kredibel, berkualitas dan *accessible* bisa didorong sebagai kebutuhan bersama. Secara tersurat mereka sesungguhnya tidak begitu fokus pada siapa yang akan menyukseskan gagasan ini, apakah mereka sebagai bagian dari masyarakat, donor, atau pemerintah. Itu sebabnya disebutkan bagian dari mereka bisa dari beragam latar belakang, termasuk Pekerja Pemerintahan.

Kesadaran bahwa Pekerja Pemerintahan ini adalah bagian keterbukaan pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari konteks bagaimana Indonesia adalah pelopor dari gerakan *Open Government*. Gerakan yang kemudian diturunkan pada semangat *Open Data* di berbagai lembaga pemerintah (Clarke dan Francoli, 2017). Artinya, semangat untuk membagikan data dari riset yang baik juga merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah. Dalam konteks ini, mereka terikat akan

gagasan yang sama, yang menyebabkan sekat-sekat kelembagaan menjadi tidak penting dalam memaknai gerakan keterbukaan pengetahuan sebagai ‘masyarakat sipil’ yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan untuk publik. Termasuk juga kepada para donor yang ‘berkepentingan’ untuk menciptakan ekosistem *Evidence Based Policy*. Dengan demikian keberadaan para pemodal/pendonor sama, mereka mendukung ini.

Isu penting yang perlu juga dikaji kemudian adalah perjuangan yang selama ini digadang-gadang sebagai nilai jual keterbukaan pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana dalam klausulnya gerakan keterbukaan pengetahuan merupakan ekspresi komunitas lintas batas dan merangkul pemerintah, mereka tetap bisa berada pada koridor perjuangan nilai. Hal ini disebabkan pada gerakan ini muncul lebih karena ada gagasan yang sama di lintas sektor, dibandingkan siapa mempengaruhi siapa. Dengan demikian, jika nilai perjuangan keterbukaan pengetahuan bisa menjadi *driver* dari gerakan lintas sektor, konsolidasi memperkuat sumber daya di semua lini bisa menjadi alternatif dalam penguatan kebijakan berbasis bukti.

Mengubah Noise menjadi Voice

Noise dalam kajian ini merujuk pada kebisingan yang muncul dari semakin derasnya arus informasi imbas dari dibukanya akses di ruang publik. Dalam konteks kebijakan di Indonesia, hal ini bisa muncul karena mulai adanya keterbukaan pengetahuan dan keterbukaan data yang keduanya sudah diinisiasi oleh pemerintah sendiri. Keterbukaan ini tentu saja menjadi bagian dari reformasi yang berimbas pada keterbukaan informasi dengan segala turunannya. Oleh karenanya, kemunculan informasi yang sangat beragam, baik dari yang nyata maupun yang tidak tentu menjadi sebuah konsekuensi logis. Hanya saja hal ini menjadi kebisingan manakala tidak dapat difilter dengan baik, secara saintifik.

Noise dalam konteks ini bisa muncul dari beragam sumber. Jika merujuk pada apa yang terjadi di masa-masa sekarang, khususnya penyikapan Covid-19, terdapat dua sumber kebisingan informasi. *Pertama* dari pihak pemerintah, *kedua* dari publik yang disebarkan melalui media sosial atau tulisan-tulisan populer. Berkenaan dengan sumber dari pemerintah misalnya, kita justru lebih banyak disuguhi respon yang terkesan menyepelkan, bahkan sebagian dianggap sebagai sikap anti-sains. Meskipun dalam beberapa konteks apa yang disampaikan ada dasar saintifiknya juga. Seperti flu yang dapat sembuh sendiri dan iklim tropis yang lebih tahan dari virus.

Di sisi publik, kebisingan informasi di ruang publik muncul selain karena bagian dari amplifikasi informasi dari pemerintah, juga dikarenakan informasi yang memang tidak valid yang bersumber dari desas desus di dalam masyarakat sendiri. Oleh karenanya, banyaknya informasi yang beredar bukannya menjadikan pemerintah dan masyarakat menjadi lebih waspada, melainkan justru menjadikan kita abai dan apatis. Hal ini menjadikan masyarakat ikut menganggap enteng persoalan yang ada.

Keterbukaan informasi ini namun demikian juga tidak dapat ditujukan hanya dari pihak pemerintah (pusat) saja. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, muncul beragam informasi yang saling berseberangan dan tumpang tindih. Sehingga alih-alih memberikan rasa aman, di sisi lain juga memunculkan kecurigaan apakah benar yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dengan demikian, transparansi itu sendiri seharusnya bersifat integral. Semua sumber daya memiliki peran yang sama-sama penting, keterbukaan bukan saja menjadi domain pemerintah pusat, melainkan juga bagian penting dari setiap elemen yang terkait. Transparansi atau keterbukaan pengetahuan ini akan menjadi basis transformasi informasi.

Diterimanya beragam informasi di ruang publik dari semula sekadar kaya menjadi dapat diterima adalah hal penting yang perlu disikapi secara baik di iklim demokrasi. Di satu sisi, pemerintah tidak lagi dapat membatasi akses informasi, bahkan mendorong keterbukaan itu meskipun belum maksimal. Di sisi lain, agar tidak menjadi *hoax* atau penyesatan informasi maka perlu ada mekanisme yang dibuat untuk memastikan informasi-informasi yang beredar adalah valid. Informasi bergeser dari sebatas terbuka yang bising (*noise*) menjadi informasi yang valid atau saintifik yang dapat diproses dan dimanfaatkan (*voice*).

Jika kita merujuk pada pendekatan *evidence based policy*, maka yang dianggap sebagai 'bukti' itu hanyalah apa yang disampaikan secara saintifik kepada pembuat kebijakan. Hal yang disampaikan oleh publik yang awam, meskipun memiliki rujukan sering kali dianggap tidak saintifik, karena posisinya yang dianggap bukan sebagai pakar. Hal ini tampak dalam skema komunikasi bencana (Zhang, 2020) yang menyebutkan bahwa alur kebijakan berbasis bukti hanya melalu pakar ke pembuat kebijakan. Padahal, bukan tidak mungkin publik di era keterbukaan saat ini juga rajin dalam mengakses tulisan populer ilmiah dan jurnal ilmiah. Poin dari *evidence* perlu dikembalikan sebagai bukti/sains, bukan semata karena kehadiran pakar secara langsung.

Informasi tidak sebatas menjejali publik dengan berita, melainkan juga menjadikannya sebagai basis untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berbasis saintifik. Pun demikian, publik juga tidak semata menunggu arahan dan kajian pemerintah, melainkan juga bisa secara langsung merujuk pada kajian-kajian saintifik lain. Hal ini tampak dari misalnya gerakan #100jutamasker-Ismail Fahmi dan KawalCovid19-Ainun Najib misalnya. Keduanya menggunakan basis-basis kajian akademik untuk membuat gerakan publik. Yang di satu sisi mempengaruhi pembuatan kebijakan dan aksi di masyarakat (gerakan #100jutamasker), di sisi lain (sebagaimana KawalCovid-19) mempengaruhi BNPB untuk memperkuat basis data sebaran Covid-19 di Indonesia. Selain hal tersebut, dialog kedua inisiator gerakan ini dengan elit lokal khususnya Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dan Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) di media sosial juga memberikan gambaran bahwa pandangan saintifik dapat dimunculkan dari selain pakar. Termasuk pengaruhnya kepada respon pemerintah sebagai sikap maupun kebijakan.

Bab II

Metodologi Riset: Strategi dan Sasaran Kebaruan

Gagasan *Evidence Based Policy* di Indonesia sesungguhnya merupakan ide yang sudah lama menjadi standar nasional (SMERU, 2011). Pemerintah dan juga lembaga-lembaga pendamping memerlukan legitimasi akademik dalam menciptakan kebijakan. Namun demikian, realitas yang muncul tidak serta merta menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat sebagai refleksi dari perdebatan 'evidence'. Pemaknaan atas data di Indonesia terbelenggu oleh setidaknya kultur membaca data: (1) Data Formal sebagaimana yang terdapat dalam aturan BPS melalui UU No 16 Tahun 1997 dan (2) wacana Rahasia Negara yang tidak memungkinkan semua data diungkap ke publik (Harkrisnowo, 2003; Mihradi, 2011).

Selain dua isu tersebut, dalam konteks global disebutkan beberapa fenomena berkenaan dengan pengetahuan dan kebijakan. Kegagalan mengelola pengetahuan menjadi kebijakan dihadapkan pada pendulum kepentingan politik dibandingkan dengan proses administratif atau kajian saintifik atas sebuah permasalahan (Kingdon, 2011). Sering kali kepentingan politik mengalahkan kalkulasi saintifik. Terdapat juga fenomena melimpahnya ide atau gagasan tetapi tidak diformulasikan menjadi temuan, banyak ide atau gagasan yang tidak sampai terwujud. Wessner (2005) menyebut ini dengan *valley of death*. Keadaan di mana terdapat ide atau gagasan ahli tetapi tidak dapat dikreasikan untuk sesuai yang lebih bermanfaat secara praktikal. Dalam konteks penelitian ini, terdapat begitu banyak temuan tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal menjadi kebijakan. Menurut Wessner dan Beard dkk (2009) sebabnya lebih banyak pada isu pendanaan. Perlu ada jembatan untuk memfasilitasi ini melalui kolaborasi (Hage dkk, 2013), rekayasa sains dan teknologi (Gulbrandsen, 2009).

Keberadaan pakar atau sumber informasi di Indonesia, merujuk SintaRistekBRIN (2020) berarti kita memiliki kekayaan sumber daya. tercatat 191.027 Penulis/ Peneliti, 4608 jurnal ilmiah beserta platform *pre-print*, 4791 Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset yang empat di antaranya masuk dalam kategori top *think tank* oleh University of Pennsylvania (McGann, 2020). Dengan demikian, sudah semestinya informasi-informasi saintifik hasil riset lembaga-lembaga ini dapat diakses oleh para pembuat kebijakan. Tidak lagi semata berbasis pada keterlibatan tenaga ahli/pakar secara fisik, melainkan gagasan dan temuan mereka dapat dioptimalkan dengan lebih baik. Sumber-sumber relevan berbasis riset ilmiah tentu bisa menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan, maupun ketika dibaca oleh publik memberikan pemahaman dan bisa menjadi input bagi pemerintah melalui ruang non akademik/populer.

Gerakan keterbukaan pengetahuan menjadi relevan dalam memaknai ulang cara kerja pembuatan kebijakan berbasis data ini. Penelitian ini sendiri tidak difokuskan pada komunitas melainkan gerakan dalam menjadikan penggunaan kajian saintifik, keterbukaan dan aksesibilitas publikasi menjadi bagian penting dalam pembuatan kebijakan dan edukasi publik, dengan sains sebagai

episentrumnya dan pakar sebagai eksploratornya (yang memberikan penjelasan). Pakar dalam hal ini terdiri dari lembaga riset, perguruan tinggi, konsultan kebijakan, *think tank*, dst.

Penelitian dengan menggunakan metode Eksplorasi dan Riset Aksi Partisipasi diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus mendorong komunitas dalam isu keterbukaan pengetahuan dan upaya menjembatani gagasan dengan kebijakan. Kedua metode ini perlu digunakan secara bersamaan untuk menjawab pertanyaan utama. Bagaimana Gagasan Keterbukaan Pengetahuan Menjadi Penggerak dan Inovasi Baru dalam Edukasi Publik dan Basis Kebijakan Melalui *Deliberasi Pengetahuan*. Deliberasi pengetahuan meniscayakan limpahan informasi di ruang publik, namun di sisi lain perlu ada upaya untuk mentransformasi informasi yang kaya itu menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam artian dapat dijadikan landasan pencerdasan publik (Pakar - Publik) dan legitimasi kebijakan pemerintah (Pakar – Pemerintah atau Pakar – Publik - Pemerintah) yang bebas *self interest*. Sebagai bagian untuk mengawal kajian yang selama ini dianggap menjadi basis kerja di internal pemerintah sendiri yang mungkin sudah dipengaruhi oleh kepentingan yang hendak dituju oleh pemerintah. Sehingga input dari pakar, hanya berfungsi untuk melegitimasi kepentingan pemerintah. Atau setidaknya informasi pakar justru terasa sudah disampaikan, akan tetapi tidak dapat diaktualisasikan.

Dalam skema 1, proses kebijakan berbasis data adalah bagaimana hubungan dua arah dari pemerintah dan juga pakar. Hal yang umumnya terjadi ini di Indonesia juga. Pakar hadir ketika pemerintah membutuhkan saja. Ditambah dengan pengandaian bahwa pakar sudah barang tentu merepresentasi keseluruhan ilmu atau informasi. Kehadiran analis kebijakan di masing-masing litbang kementerian dengan demikian merupakan salah satu bentuk dari *evidence based policy* tersebut. Termasuk juga yang terjadi saat ini, sesungguhnya ketika menteri dan posisi penting dijabat oleh orang dengan latar belakang yang sesuai, maka secara tidak langsung menjadi legitimasi bahwa apa yang akan dikerjakan sudah barang tentu dapat diterima secara saintifik. Contoh dari hal ini misalnya ketika menteri kesehatan berbicara soal 'penyakit karena virus dapat sembuh sendiri'. Atau, tetap penting menteri ekonomi memikirkan investasi wisata di kala pandemi. Nalar yang demikian, jika merujuk pada keumuman *evidence based policy* tentu saja masih bisa diterima. Karena yang menyampaikan adalah pakarnya sendiri, yang sudah barang tentu memiliki basis keilmuan yang tepat untuk menanggapi hal tersebut. Sehingga *interest* yang ada tetap bisa dianggap sebagai *evidence based*, kebijakan yang berbasis landasan ilmiah.

Skema 1. *Evidence Based Policy* Secara Umum dan Strategi Komunikasinya

Sumber: Zhang dkk (2020)

Namun demikian, yang terjadi di Indonesia saat ini sesungguhnya tidaklah *evidence based policy* secara umum. Disebabkan bahwa terdapat juga masukan-masukan publik yang secara langsung maupun tidak langsung ditangkap oleh pemerintah untuk kemudian digunakan sebagai basis pembuatan kebijakan. Saat ini, selain menggunakan basis informasi dari internal pemerintah, pemerintah juga mulai melibatkan pakar yang ada di luar mereka. Misalnya kajian-kajian yang dilakukan oleh UI, ITB, UGM dalam permodelan sebaran Covid-19 oleh Bappenas. Hal ini juga yang serupa dijalankan oleh KawalCovid19 yang mengajak peneliti ITB dalam membuat permodelan terkait Covid19. Oleh karenanya, sedang terjadi perubahan dalam memaknai informasi dan kajian saintifik sebagai bagian dari proses kebijakan. Informasi yang tersebar di ruang publik kemudian dikelola dan dipilah dari *noise* menjadi *voice* melalui argumen-argumen saintifik.

Skema 2: Publik Terpapar Sains
Keterbukaan dan reposisi pengetahuan sebagai basis
diskursus sains, edukasi publik dan pembuatan kebijakan
Sumber: Penulis. Modifikasi dari Zhang dkk (2020)

Perubahan kerja *evidence based policy* secara langsung tampak dari bagaimana sains juga kemudian digunakan oleh publik untuk mendorong pembuatan kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan basis saintifiknya. Kekayaan informasi di ruang publik juga secara tidak langsung dapat difilter melalui keberadaan kajian-kajian akademik yang disajikan baik secara ilmiah maupun melalui artikel-artikel populer ilmiah. Di satu sisi, ini menjadi jalan lama dalam membangun basis pembuatan kebijakan sebagaimana yang selama ini berproses melalui relasi pemerintah dan pakar. Baik yang digunakan sebagai informasi saintifik maupun sebagai basis legitimasi kepentingan. Dan yang lebih penting adalah dengan mulai mudahnya kajian ilmiah diakses publik, maka publik juga dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah. Mengubah dari tuntutan yang berbasis hasrat kepentingan yang bersifat *self interest*, menjadi tuntutan yang memang bagian dari kepentingan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh banyak pihak.

Bagaimana kita dapat membedakan antara kepentingan yang hanya sebatas *self interest* dengan kepentingan yang benar-benar kebutuhan banyak pihak, tentu

salah satunya adalah melalui keputusan yang muncul. Apakah ada basis keilmuan yang bisa digeneralisasi, ataukah hanya kepentingan satu kelompok. Di sinilah pentingnya keterbukaan pengetahuan dan penggunaan basis keilmuan sebagai alat mendorong pembuatan kebijakan yang akan digunakan. Mengubah yang semula hanya relasi aktor, menjadi relasi aktor dengan kajian saintifik yang dapat diakses secara luas termasuk untuk pakar dan publik. Dengan kata lain, pondasinya bukan pada ada atau tidaknya pakar dan publik yang dilibatkan, melainkan apa yang disampaikan: sains dan bukti empiris. Baik di antara komunitas pakar, internal pemerintah maupun bacaan publik. Sehingga tidak akan lagi muncul kegaduhan di ruang publik imbas dari keragaman informasi, karena justru keragaman yang dilegitimasi itu adalah saling menguatkan satu sama lain.

Dengan membandingkan dua alur *evidence based policy* di atas, penelitian ini dibangun melalui modifikasi temuan Zhang (2020) berkenaan dengan strategi komunikasi respon kebijakan pada isu Covid-19. Terdapat hal yang berbeda meskipun memang belum sepenuhnya telah di jalankan, dalam konteks Indonesia selain memanfaatkan informasi saintifik dari pakar, kebijakan sering kali muncul internal kajian/kepentingan pemerintah dan dari dorongan publik. Oleh karenanya, tradisi pelibatan pakar pada proses kebijakan dan edukasi terhadap publik yang saintifik adalah keniscayaan dan penting untuk diperkuat. Secara spesifik adalah bagaimana informasi saintifik masuk dalam diskursus pakar, diskursus pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan publik sebagai pemberi input bagi pemerintah. Yang terpenting adalah dinamika sains/bukti empiris yang digunakan sebagai landasan dialog, bukan pada aktor-aktornya. Sehingga keterbukaan pengetahuan dan pengaruhnya dalam transformasi *noise* menuju *voice* dapat menjadi agenda baru dalam strategi *evidence based policy*.

Metode Eksplorasi

Metode Eksplorasi dipilih menjadi bagian dari penelitian ini disebabkan karena gerakan keterbukaan sains/pengetahuan, termasuk di dalamnya keterbukaan data, baik secara internasional maupun nasional tergolong masih jarang dikaji. Kajian yang sudah cukup sering dibahas justru lebih kepada aktivitas *open access* yang dalam hal ini merupakan platform untuk mendapatkan referensi. Dengan demikian, penggunaan metode ini diharapkan dapat mengenalkan gerakan ini dalam ruang perdebatan akademik sekaligus kebijakan. Di mana selama ini kebijakan khususnya di Indonesia menjadi ranah dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tunggal dan di luar itu sebatas sebagai pendukung proses kebijakan.

Penggunaan metode ini secara mendasar adalah untuk menjadikan topik yang relatif baru dapat dikenal secara luas, dapat menghasilkan temuan yang valid dan 'mencerahkan' (Reiter, 2017; Setbbins, 2008). Di sisi lain dengan membahas hal yang baru yang dengan metode yang fleksibel maka akan membuka peluang adanya inovasi-inovasi akademik baru dalam membaca realitas kekinian ini sebagai teori. Metode ini juga memungkinkan untuk menjelaskan gerakan keterbukaan sains/pengetahuan secara lebih mendalam, baik dari aspek motivasi kemunculan

mereka, sumber daya berbasis gagasan dan aktor yang lintas lembaga, hingga bagaimana perjuangan mereka dalam mewujudkan riset yang kredibel sebagai basis publikasi dan implikasinya terhadap kebijakan. Eksplorasi tidak sebatas pada apa yang dilakukan, melainkan juga terhadap siapa mereka berkolaborasi dan berinteraksi mewujudkan kebermanfaatan publik di bidang akademik dan kebijakan secara praktik.

Untuk memperkuat argumen analisis, akan dilakukan juga analisis kuantitatif kausalitas untuk menjelaskan sejauh mana keterbukaan sains dan data dapat dipahami oleh publik non pakar dalam mengedukasi publik sekaligus memengaruhi pembuatan kebijakan. Namun demikian, fokus yang lebih diutamakan dari analisis ini lebih kepada pemetaan secara deskriptif. Sedangkan elaborasi yang lebih mendalam dengan melalui wawancara kepada pihak terkait. Publik non pakar dan lingkaran pembuat kebijakan.

Riset Aksi Partisipasi (RAP)

Selain menggunakan metode riset Eksplorasi yang bertujuan untuk memuka hal baru dalam kajian ini, penelitian ini juga memakai metode RAP untuk mendukung pengungkapan temuan dan gagasan dari gerakan keterbukaan sains. Metode ini digunakan untuk mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dan melibatkan secara aktif pihak-pihak yang relevan. Dalam hal ini pegiat komunitas dan juga aktor-aktor (Lembaga riset, Perguruan Tinggi, *Think Tank*, Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional) secara intens berinteraksi dalam pembuatan kebijakan. Aktor-aktor ini merupakan lembaga yang membuka ruang untuk keterlibatan diskursus penelitian kredibel dan perannya dalam kebijakan.

Metode RAP juga penting untuk menjelaskan secara kritis konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi dan juga aspek lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan yang akan dikaji. Pemetaan awal atas aktor dan gagasan menjadi bagian penting dalam upaya agenda setting perubahan yang menjadi basis dari metode RAP ini (Chevalier dan Buckles, 2019; Whyte dkk, 1991). Hal ini disebabkan salah satu fungsi dari penggunaan RAP adalah untuk memberikan dampak perubahan atas apa yang sedang dikaji, termasuk membangun strategi dan meluaskan gerakan. Imbasnya, kajian atas gerakan keterbukaan sains ini akan membuka ruang-ruang baru untuk keterlibatan beragam aktivitas dalam ekosistem pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan. Mereka mengubah cara berpikir publikasi yang semula *index-minded* menjadi *kredibilitas-minded* untuk kebermanfaatan dalam pembuatan kebijakan.

Riset eksplorasi dan partisipasi aksi memungkinkan peneliti untuk terlibat secara mendalam dalam gerakan keterbukaan sains dan data, sembari memberikan masukan konstruktif agar gerakan mereka dapat lebih efektif berjalan. Gerakan ini sejatinya memang masih sangat baru, oleh karenanya, untuk mencapai tujuan edukasi publik dan mempengaruhi kebijakan maka perlu ada keterlibatan yang lebih intens dan lintas lembaga. Peneliti dalam hal ini perlu untuk menjembatani interaksi lintas

lembaga tersebut melalui kajian dua arah, dari pemerintah maupun dari para pegiat keterbukaan sains dan data.

Secara spesifik untuk mengeksplorasi gerakan keterbukaan sains dan data, terdapat beberapa nara sumber yang akan digali informasinya: *klaster pertama* komunitas sains terbuka dan juga Open Government Indonesia. Kedua gerakan ini akan dicari motivasi keberadaannya, kontribusi internal maupun kontribusi mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik. Terdapat beberapa komunitas yang tersebar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga, mulai dari ITB, UGM, Unair, LIPI, Open Government Indonesia, Knowledge Sector Initiative dan juga lembaga pemerintah seperti Bappenas dan RistekBRIN. Hal ini untuk mengelaborasi kondisi dan kesiapan kita dalam mewacanakan deliberasi pengetahuan. Fokus pada bagian ini adalah diskursus tentang keterbukaan sains dan data. **Bagaimana keterbukaan pengetahuan (publikasi riset, artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer) memperkaya basis sekaligus mengurai bias *evidence* pada diskursus pakar, pembuatan kebijakan dan edukasi publik?**

Sedangkan pada *klaster kedua* akan difokuskan pada bagaimana akses terhadap pengetahuan atau sains dimanfaatkan oleh publik non pakar untuk memberikan masukan bagi pemerintah. Dalam hal ini, sebagaimana yang akan dikaji, maka fokus akan lebih banyak kepada para pegiat KawalCovid19 dan gerakan 100jutamasker. Gerakan yang diinisiasi oleh publik yang tidak masuk dalam kategori pakar. Termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah (khususnya di level provinsi) merespon masukan-masukan publik yang notabene bukan pakar ini. Elaborasi atas ini akan ditujukan kepada eksekutif termasuk di dalamnya staf ahli maupun staf khusus, baik yang berada dalam struktur pemerintahan maupun yang secara intens merespon dialog yang muncul di media sosial. Hasil-hasil wawancara kemudian dikombinasikan dengan pemetaan interaksi melalui survey (Ritchie dkk, 2013) untuk menjelaskan bagaimana akses dan keterbukaan sains serta data menjadi alternatif bagi interaksi publik-pembuat kebijakan berbasis sains. **Bagaimana politik keterbukaan menjadi arena *deliberasi* pengetahuan dalam diskursus kebijakan berbasis *evidence* melalui relasi Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) – Pakar (BNPB, Perhimpunan Asosiasi Kesehatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset Terkait) – Publik (KawalCovid19 dan Gerakan #100JutaMaskerChallenge). Sehingga publik non pakar dapat terlibat dalam proses kebijakan berbasis data beserta prospek penguatannya?**

Bab III

Kajian Pustaka: Kelindan *Evidence Based Policy* dan Kontekstualisasi di Indonesia

Kebuntuan Gagasan: Valley of Death, Brokering Pengetahuan dan Bias yang Eksis

Hal penting dalam penelitian ini adalah pengungkapan bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh peneliti sebagai *evidence based policy* sesungguhnya memiliki banyak tantangan dalam interaksi antara saintis dan pembuat kebijakan. Tidak saja dalam konteks bagaimana kemunculan sains menjadi kebijakan, namun demikian juga bagaimana kontestasi pengetahuan dalam berjuang untuk terwujud sebagai kebijakan dan produk. Setidaknya secara umum terdapat tiga fenomena dalam pembentukan kebijakan *so called* berbasis bukti atau sains: *Pertama*, dalam interaksi antara pengetahuan dan prospeknya menjadi kebijakan atau produk, kita mendapati yang disampaikan oleh Wessner sebagai *Valley of Death*. Gambaran yang disampaikan oleh Wessner (2005) adalah dengan menunjukkan bahwa dalam transformasi pengetahuan menjadi kebijakan atau produk tidak jarang menemui kendala yang basisnya adalah struktural dan administrasi. Salah satu yang menonjol adalah skala prioritas yang dihadapkan pada penganggaran (Beard dkk, 2009). Dengan adanya keterbatasan dana inilah kemudian pemerintah memberikan prioritas pada satu gagasan dibandingkan gagasan yang lain. Inovasi yang muncul dari realitas ini adalah kerja sama antara negara dengan industri, sehingga apa yang tidak dapat dikerjakan pemerintah, dan itu dibutuhkan oleh industri dapat diwujudkan melalui pembiayaan bersama (Gulbrandsen, 2009). Inovasi-inovasi berbasis sains dan teknologi sering kali muncul dari keadaan ini, sebagaimana kajian *triple helix*, *penta helix* dst. Hanya saja, solusi-solusi yang ditawarkan dalam menjembatani hal ini bukannya tanpa masalah. Terdapat beberapa dampak dari kolaborasi dari sektor bisnis dalam kebijakan-kebijakan publik yang kemudian justru membawa pada iklim komersialisasi sains (Barr dkk, 2009).

Jika kajian terkait *Valley of Death* lebih banyak mengungkap tentang keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah yang kemudian dijembatani oleh kolaborasi dengan dunia industri, maka fenomena keterlibatan pengetahuan dalam kebijakan yang lain merupakan interaksi antara pembuat kebijakan dengan para pakar. Para pakar di sini menjadi kekuatan yang dominan dalam memberikan input kepada pemerintah tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Dalam konteks *evidence based policy*, tentu saja ini adalah hal yang ideal. Kebijakan dan produk muncul dari kajian yang dihasilkan ahli. Namun demikian, pada kenyataannya, sesungguhnya apa yang sedang terjadi dalam interaksi ini bukanlah sepenuhnya tangkapan atas kajian ilmiah secara utuh. Melainkan hal ini sangat berkaitan dengan 'penyediaan pengetahuan'. Terdapat broker-broker pengetahuan yang dilibatkan secara aktif oleh pemerintah dan kemudian menyingkirkan pakar yang lain di luar lingkaran mereka. Broker-broker pengetahuan ini yang kemudian menjadi legitimasi bagi pembuat kebijakan bahwa mereka sudah menjalankan prosedur *evidence based policy* secara normatif.

Pada titik tertentu *brokering knowledge* menunjukkan keterlibatan pakar dalam beberapa tahapan: *access, learning, bridging dan linking* (Hargadon, 2002; Ye dkk, 2012). Mereka meramu pengetahuan dari sumbernya menjadi keputusan-keputusan yang perlu diambil pemerintah. Tugasnya tidak hanya memproduksi kajian-kajian saintifik, melainkan termasuk menyampaikan itu kepada khalayak (Bielak dkk, 2008; Meyer, 2010). Hanya saja terdapat kelemahan di dalam proses interaksi yang terlalu intens ini. Di mana ketika hubungan semakin kuat dan menjadi broker yang sudah terlembaga, maka keberadaan pakar justru akan menjauhkan publik dari partisipasinya atas kebijakan (Stoker, 2016). Artinya, ketika kemudian suara mereka tidak mendapat tempat pada sistem yang lebih populis dan tidak sensitif sains, maka bukan tidak mungkin hanya akan memunculkan lembah-lembah kematian pengetahuan baru.

Persoalan lain yang juga muncul dalam pembentukan kebijakan berbasis data bukti atau sains adalah kemunculan bias dalam pembentukan kebijakan. Secara ideal, memang apa yang menjadi diskursus pembentukan kebijakan adalah adanya kajian ilmiah atas apa yang diusulkan para saintis atau pakar. Hanya saja, yang terjadi tidaklah seideal yang diharapkan. Pemerintah, sebagaimana yang juga terjadi dalam keadaan *valley of death*, memiliki berbagai keterbatasan dalam meramu gagasan yang ada menjadi kebijakan dan produk. Secara lebih spesifik berkenaan dengan bias ini, terdapat dua kategorisasi yang cenderung dominan terjadi (Parkhurst, 2017). Hal yang pertama adalah meskipun memang memiliki tim pakar yang akan berguna untuk memberikan masukan, pemerintah pada dasarnya bukanlah organ yang statis. Mereka juga memiliki agenda atau kepentingan. Oleh karenanya, apa yang dianggap oleh para ahli sebagai sesuatu yang penting untuk dikerjakan, dan sudah diteruskan kepada pemerintah, ketika pemerintah memiliki prioritas lain maka masukan itu tidak akan dijalankan. Ditambah lagi ketika pengambil kebijakan memiliki keterbatasan: keterbatasan mendeteksi masalah hingga implementasi.

Oleh karenanya, pendekatan dalam kebijakan publik tidak dapat lagi dilihat dari prosedur formal semata dengan pengandaian bahwa baik pembuat kebijakan maupun pakar berada dalam koridor ideal. Memberi dan menerima masukan secara menyeluruh dan akan mewujudkannya sebagai sebuah kebijakan ataupun produk. interaksi yang dimunculkan oleh pembuat kebijakan dan pakar, tidak saja diwarnai oleh kepentingan melainkan juga skala prioritas dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, belum tentu apa yang seharusnya secara ideal diwujudkan, akan dengan serta merta terwujud. Hal ini menjadi persoalan yang semakin pelik, ketika pembuat kebijakan atau pemerintah memiliki kecenderungan sebagai aktor yang populis.

Aktor atau pemerintah yang populis lebih berusaha untuk merepresentasi publik. Apa yang dianggap baik oleh publik, itulah yang akan dijadikan tujuan akhir. Meskipun sesungguhnya hal ini belum tentu sejalan dengan prinsip demokrasi yang juga mengedepankan kesadaran memilih (Mudde dan Kaltwasser, 2017) Dengan kata lain, meskipun kajian-kajian ilmiah tidak mendukung apa yang diharapkan oleh masyarakat secara luas, maka harapan itu yang akan dicoba diwujudkan. Pertumbuhan ekonomi, ekspresi individu dst merupakan salah satu perwujudan dari

populisme di era pancemi Covid-19. Amerika Serikat demikian juga di Indonesia, menunjukkan bahwa kajian-kajian akademik menjadi pertimbangan ke sekian dalam merespon pandemi, dibandingkan isu-isu ekonomi dan kemasyarakatan lain. Dengan demikian, pencerdasan publik menjadi salah satu agenda penting dalam menyuarakan apa yang legitimate secara saintifik.

Diskursus Evidence Based Policy dan Partisipasi Saintifik Publik

Berdasarkan analisis sistematis terhadap hampir 400 publikasi, French (2018) memetakan relasi antara pembuat kebijakan dan akademika. Salah satu aliran pemikiran mendukung tuntutan bahwa pemerintah lebih memperhatikan penelitian. Perspektif kedua berpendapat perlunya mereformasi hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan. Yang ketiga menekankan perlunya menciptakan kembali prosedur formal yang mengatur pembuatan dan penggunaan bukti. Yang keempat menolak kemungkinan bahwa penelitian dapat secara simultan memenuhi standar disiplin dan secara bermakna menjawab kebutuhan para pembuat kebijakan. Artinya, relasi antara akademika pembuat kebijakan (pemerintah) dan akademika perlu mendapat ruang yang lebih luas dalam kaitannya dengan pemaknaan 'data'.

Proses kebijakan kekinian yang urgent untuk dibahas adalah membawa data dalam proses kebijakan. Dalam konteks negara pasca-otoritarianisme semacam Indonesia, gagasan ini memang menjadi tuntutan yang urgent. Kita semula di masa Orde Baru mendapati bahwa kebijakan cenderung pada budaya "Asal Bapak Senang". Kebijakan tidak dibangun berdasarkan basis keilmuan yang cukup, tidak mengambil riset-riset yang independen, melainkan lebih kepada bagaimana kebijakan itu dihasilkan sesuai dengan harapan dari pemerintah yang berkuasa. Pellini dkk (2018) menyebutkan bahwa hingga saat ini, kultur relasi antara pembuat kebijakan dan akademika (orang yang memiliki legitimasi keilmuan) memang belum mutualistik. Keduanya masih terdapat kesenjangan hubungan yang menyebabkan ekosistem *evidence based policy* di Indonesia menjadi tidak optimal.

Evidence Based Policy menjadi formula penting dalam pembuatan kebijakan muncul dari anggapan bahwa terdapat mekanisme kontrol dalam penggunaan data untuk pembuatan kebijakan. Artinya apa yang digunakan tidak berdasarkan pilihan sekejap, melainkan memang sesuatu yang diacak dan kemudian dapat dimanfaatkan secara konsisten, *Randomized Controlled Trials (RCTs)* (Cartwright, N., & Hardie, 2012). Secara ideal penggunaan data yang dikontrol secara random ini menitikberatkan pada netralitas. Oleh karenanya, muncul anggapan bahwa kemunculan data yang kemudian menjadi basis dalam kebijakan adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan jauh dari data palsu dan bias.

Kebijakan yang dihasilkan dari proses yang demikian, harapannya sejalan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh publik. Dengan adanya keragaman maka bias-bias data dapat diminimalisasi melalui proses yang disepakati secara otoritatif, baik otoritas pembuat kebijakan maupun otoritas keilmuan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh French, perlu mekanisme baru dalam memfasilitasi semakin mudahnya informasi tersaji di ruang publik dan juga

perdebatan pembuatan kebijakan. Dengan demikian apa yang disajikan dapat ditangkap dengan lebih baik untuk dijadikan dasar kebijakan.

Namun demikian, pembuatan kebijakan yang berbasis data atau pengetahuan memang tidak mudah untuk dijauhkan dari bias. Setidaknya Smith (2013) menyebutkan ada faktor politisi (politik) dan akademisi (ide) dalam proses kebijakan yang menyebabkan keduanya perlu mendapatkan *trigger* yang sama. Terdapat logika yang berbeda dari politik dan ide, di mana yang pertama lebih pada pemenuhan kepentingan, citra dst. Sedangkan nalar ide lebih kepada apa yang seharusnya dan baik untuk dikerjakan. Pada pertemuan dua nalar ini kemudian muncul bias-bias dalam pembuatan kebijakan, meskipun data yang ada sudah tersaji sebagai dasar pembuatan kebijakan. Oleh karenanya, diperlukan adanya pelembagaan ide melalui peneliti dan juga pembuat kebijakan.

Konteks mengenai hal ini adalah perlunya mendorong keterlibatan yang lebih dari para peneliti untuk berperan dalam pembuatan kebijakan. Jika sebelumnya yang muncul hanyalah mereka yang dianggap ahli, maka dalam kondisi yang semakin terbuka seperti saat ini kebutuhan akan kemunculan data dari para peneliti menjadi lebih *urgent*. Pelembagaan ide tidak pada representasi aktor, melainkan kemunculannya secara bersama. Dengan adanya keterbukaan sains/ pengetahuan maka bias argumen menjadi dapat dihindari. Lebih jauh, dengan adanya deliberasi ini, maka publik juga menjadi lebih memiliki banyak opsi dalam merespon persoalan kemasyarakatan.

Semakin terbukanya data untuk digunakan dalam pembentukan kebijakan, sebagaimana fungsinya dalam meminimalisir bias sesungguhnya juga memunculkan tantangan baru. Parkhurst (2017) menyebutkan perlu adanya gelombang yang mengarahkan kita dari *Evidence Based Policy* menuju *Good Governance of Evidence*. Kita tidak serta merta menerima segala sesuatunya sebagai data, melainkan pemerintah (termasuk akademia) memiliki tanggung jawab selain menyajikan data, juga memastikan bahwa data yang disampaikan adalah data yang kredibel dan layak untuk dijadikan acuan. Hal ini menjadi penting mengingat pada kenyataannya, sebagaimana juga yang terjadi di Indonesia, kepentingan sering kali berada di posisi yang lebih mendesak untuk dipenuhi oleh politisi dibandingkan dengan kebutuhan sesungguhnya. Pandangan publik menjadi prioritas utama.

Tantangan yang ada dengan demikian adalah membuka ruang bagi pakar untuk menyampaikan temuannya. Mereka perlu diberi ruang untuk 'bersuara', menyampaikan temuan (Krumer-Nevo, 2008). Sejauh memang kajian itu benar-benar dilaksanakan dan dikerjakan sesuai standar ilmiah. Kebutuhan akan standarisasi dalam penyampaian temuan bukan berarti menjadikan standar itu sebagai satu-satunya ruang untuk memperdebatkan apa yang terbaik dalam pembuatan kebijakan, melainkan memberikan jaminan bahwa apa yang disampaikan bukanlah sesuatu yang dihasilkan lewat falsifikasi. Standar-standar ini bukan berarti pula bahwa yang berhak memberikan legitimasi pihak tertentu, melainkan dalam konteks membuka lebar keterbukaan dengan panduan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini

penting agar ruang diskusi kebijakan tidak dipenuhi dengan *noise* yang justru mengaburkan pembuatan kebijakan dari substansi yang hendak dicapai.

Secara lebih spesifik, Hoover (2018) dengan mengambil studi tentang kesehatan mengajukan beberapa alternatif dalam menjembatani informasi dan kebijakan yang dikenal dengan GRIPP (*Getting Research Into Policy and Practice*): Mendesain ulang kajian ilmiah menjadi populer, memperkuat jejaring akademik dan pembuat kebijakan, membangun lembaga *intermediary*, meningkatkan kinerja *partnership* pakar dan praktisi. Dalam kajian ini, Hoover secara umum melihat bahwa pakar menjadi pusat dari interaksi pengetahuan dan kebijakan. Namun demikian usulan tentang membumikan bahasa sains menjadi bahasa publik adalah hal yang penting. Terlebih dengan adanya gelombang keterbukaan sains, maka semakin mudahnya data dan sains dibaca oleh publik maka hal ini akan memudahkan publik untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan.

Keberadaan gerakan keterbukaan sains dan data ada pada posisi ini. Dengan adanya realitas bahwa data yang digunakan dalam pembuatan kebijakan bergantung pada banyak hal, kemungkinan bias data itu menjadi sangat kuat. Keterbukaan data yang kredibel, yang dapat diakses oleh pembuat kebijakan dan publik dari mana pun sumbernya akan mampu meminimalisir bias tersebut. *Deliberasi* pengetahuan dengan demikian akan menjadi sarana, selain kolaborasi lintas aktor juga akan mengoptimalkan sumber daya data untuk pembentukan kebijakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, dengan adanya pembawa gagasan yang lintas lembaga tersebut, maka pengarus utamaan gagasan kesetaraan dan keterbukaan data akan menjadi lebih mudah. Informasi tidak lagi menjadi satu pintu dari pemerintah yang sesungguhnya hanya memiliki otoritas pembuat kebijakan dan bukan pemilik otoritas keilmuan. Apresiasi atas data yang kredibel sesungguhnya merupakan keniscayaan dalam ekosistem *evidence based policy*. Kebijakan yang berbasis data, sesungguhnya merupakan kebijakan yang mengakomodir dan dipilih melalui data-data yang ada. Sebagaimana logika *RCTs*. Yang lebih penting adalah ada atau tidaknya sains atau data yang digunakan sebagai argumen, dan bukan persoalan siapa yang menyampaikan.

Pola yang sedikit berubah ini, menjadikan keterbukaan sains dan data sebagai basis dari gerakan KawalCovid19 dan 100jutamasker dalam mempengaruhi pandangan publik dan sekaligus pembuat kebijakan. Keduanya membangun kesadaran publik dalam merespon pandemi. Termasuk juga kepada pemerintah, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk bersikap lebih pro-aktif. Memperbaiki peta sebaran, mapping proyeksi hingga penyiapan kelengkapan APD di masyarakat maupun tenaga kesehatan. Apa yang dilakukan oleh publik dan pemerintah tidak semata merujuk pada masukan pakar secara langsung, tetapi juga mengapresiasi pandangan dari publik non pakar yang saintifik.

Kontekstualisasi Indonesia

Kebijakan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah didominasi oleh kekuasaan atas pengetahuan oleh pemerintah. Dalam hal ini eksekutif adalah bagian

dari program pengembangan. Mulai dari Garis Besar Kebijakan Negara (GBHN) hingga implementasi Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang (RPJM). Kebijakan yang dihasilkan berdampak pada pemenuhan target, dan minimal pada peran akademisi dan lembaga pendidikan dan penelitian. Jika ada, ini adalah bagian dari pencarian legitimasi dan tidak didasarkan pada studi independen. Pellini dkk (2018) menyebut hal ini bagian sebagai 'Brokering Pengetahuan'.

Hubungan antara akademisi dan pembuatan kebijakan adalah hal yang *urgent* untuk dikaji. Akademisi perlu dilibatkan dalam proses penelitian dan publikasi untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sisi lain bagaimana proses ini mendapat dukungan dari akademisi dan peneliti sebagai bagian dari penguat legitimasi. Setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Pertama, bagaimana hubungan antara penelitian dan pembuatan kebijakan. Ada perbedaan antara dua kelompok akademik dalam kapasitas mereka untuk menghubungkan penelitian dan kebijakan. Di mana sebenarnya dalam konteks Indonesia keduanya tidak selalu berjalan seiring. Kampus dan lembaga penelitian pemerintah memiliki peran berbeda yang pada kenyataannya tidak saling mendukung. Perguruan Tinggi misalnya, lebih berorientasi kepada tugas akhir dan publikasi lulusan. Keterlibatan mereka dalam kebijakan justru diwakili oleh individu sebagai staf ahli. Di sisi lain, lembaga penelitian pemerintah juga dianggap sebagai satu-satunya *think tank* dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam memetakan potensi dan masalah nasional. Kita bisa merujuk pada peran Litbang kementerian dan dinas, LIPI, Bappenas, Bappeda, dll.

Kedua, faktor politik dan sumber daya terkait dengan bagaimana pengetahuan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Dalam beberapa dekade terakhir, posisi politik dalam menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah lebih dominan. Kebijakan lebih didasarkan pada apa yang perlu dilakukan pemerintah, baik itu eksekutif atau legislatif dalam mencari simpati publik. Oleh karena itu tidak jarang ditemukan bahwa kebijakan tersebut tampaknya merupakan kebijakan 'bangun tidur'. Kebijakan yang tidak dirumuskan dengan baik, tetapi dihasilkan dari tuntutan kelompok dalam masyarakat atau pemimpin itu sendiri. Apa yang dilakukan bukanlah apa yang dibutuhkan, tetapi apa yang diinginkan oleh mereka. Akibatnya, menundukkan bahwa kebijakan harus didasarkan pada studi masih di bawah bayang-bayang kepentingan politik. Perlu ada reformasi pendekatan tentang bagaimana kebijakan diangkat.

Perubahan hubungan negara dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan adalah implikasi lain dari positioning pengetahuan dalam politik kebijakan. Selama Orde Baru, masyarakat sipil terbatas dalam ruang pembuatan kebijakan. Beberapa *think tank* yang muncul sebagai bagian dari masyarakat sipil dikenal sebagai pemberi rekomendasi pemerintah, Center for Strategic and International Studies (CSIS) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) misalnya. Hubungan mereka dari atas ke bawah (Crawford, 2003; Nachiappan et. Al., 2010). Namun, sejak reformasi ada banyak lembaga serupa yang berpartisipasi dalam proses kebijakan pembangunan, hubungan kolaboratif. Kita bisa menyebut SMERU, CIFOR,

Knowledge Sector Initiative (KSI), dll. Dalam satu dekade terakhir, KSI merupakan refleksi dari kerja sama yang intens antara pemerintah yang diwakili oleh Bappenas dan masyarakat sipil (Pellini dkk, 2018). Pada titik ini, kebijakan dan pembangunan dapat diharapkan bergeser dari dominasi pemerintah ke kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ekosistem yang ada telah membawa kita pada pentingnya data dan kolaborasi akademik dibandingkan dengan siapa yang memiliki kekuatan di luar kebijakan.

Ekosistem kebijakan berbasis bukti di Indonesia sebenarnya bukan hanya bagian dari hubungan yang lemah antara 'pemilik otoritas' dan akademisi dan pembuat kebijakan. Selain itu ada juga beberapa isu penting terkait budaya di dunia akademik di Indonesia. Ini adalah alasan bahwa sumber daya 'data' tidak dapat berfungsi secara optimal dalam pembuatan kebijakan. Dalam wacana penelitian di Indonesia setidaknya ada keterbatasan data yang sering dihadapi para peneliti. Tidak hanya peneliti dari pemerintah, tetapi juga mahasiswa di universitas dan peneliti asing. Oleh karenanya apa yang dianggap sebagai basis pengetahuan dalam kebijakan bisa jadi tidak diambil dari pengetahuan yang utuh.

Inovasi dengan demikian penting dalam optimalisasi penggunaan data untuk pembuatan kebijakan. Data dalam konteks kebijakan bukan lagi sekadar hasil studi, tetapi segala sesuatu yang dapat diakses oleh publik sebagai bahan untuk dianalisis dan direspon dalam bentuk kebijakan. Mengacu pada data yang diambil dari media sosial. Contoh yang sudah diterapkan misalnya Upik di Yogyakarta dan Qlue di DKI Jakarta dan beberapa kebijakan di tingkat nasional (Nurhidayati, 2019). Jika akses informasi yang valid dapat diterima dengan mudah oleh publik melalui keterbukaan informasi dan sains, maka aplikasi-aplikasi semacam ini akan mampu menjadi jembatan dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif. Tidak hanya melalui jalur pakar ke pemerintah, melainkan juga dari publik ke pemerintah.

Alur Berpikir

Latar Belakang	Fokus	Tujuan Penelitian	Pertanyaan Utama	Sub Pertanyaan	Tema Kunci
Kebutuhan akan Keterbukaan Data/Informasi	Keterbukaan Sains/Pengetahuan dan Informasi	Menganalisis latar belakang kemunculan gerakan keterbukaan sains Beserta Aktor yang Terlibat	Bagaimana Gagasan Keterbukaan Sains Menjadi Penggerak serta Inovasi Baru dalam Edukasi Publik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Covid-19 di Jawa Barat dan Jawa Tengah?	Bagaimana Gagasan Sains Terbuka Menjadi Penggerak Ekosistem <i>Evidence Based Policy</i> ?	Sains Terbuka
Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia		Menganalisis Perdebatan Keterbukaan Informasi dan Tantangannya di Indonesia			Politik Big Data
Diskursus Rahasia Negara dan Data Resmi	Perdebatan dan Kolaborasi Menuju 'Kebijakan Berbasis Riset'	Menganalisis Gagasan-Gagasan Pro-Kontrak atas Keterbukaan Data/Informasi Publik		Bagaimana Kolaborasi Memperkaya Data Melalui Desakralisasi Indeksasi?	Kolaborasi Lintas Sektoral
Transparansi Riset dan Strategi Indonesia Menuju <i>Open Government</i>		Menganalisis Strategi dan Kolaborasi Pemerintah dalam Mendorong Open Data			Repository dan Kebijakan

Korelasi antara Latar Belakang, Fokus, Tujuan dan Pertanyaan

Pembabagan Disertasi

- Bab 1 Pendahuluan: Politik Pengetahuan dan Kebijakan di Indonesia
- Bab 2 Metodologi Riset: Strategi dan Sasaran Kebaruan
- Bab 3 **Kajian Pustaka:** Kelindan *Evidence Based Policy* dan Kontekstualisasi di Indonesia
- Bab 4 Deliberasi Pengetahuan: Optimalisasi Sumber Daya Literasi dalam Pembuatan Kebijakan
- Bab 5 Keterbukaan dan Politik Kebijakan Publik: Peran Sains Merekonstruksi Relasi Negara - Publik - Pakar
- Bab 6 Kesimpulan: Mendudukkan Pengetahuan sebagai Basis Diskursus Pakar, Edukasi Publik dan Pembuatan Kebijakan

Referensi

- Barr, S. H., Baker, T. E. D., Markham, S. K., & Kingon, A. I. (2009). Bridging the valley of death: Lessons learned from 14 years of commercialization of technology education. *Academy of Management Learning & Education*, 8(3), 370-388.
- Beard, T. R., Ford, G. S., Koutsky, T. M., & Spiwak, L. J. (2009). A Valley of Death in the innovation sequence: an economic investigation. *Research Evaluation*, 18(5), 343-356.
- Bielak, A.T., Campbell, A., Pope, S., Schaefer, K., & Shaxson, L. (2008). From science communication to knowledge brokering: the shift from "science push" to "policy pull." In D. Cheng, M. Claessens, T. Gascoigne, J. Metcalfe, B. Schiele, & S. Shi (Eds.), *Communicating science in social contexts: New models, new practices* (pp. 201-226). Amsterdam: Springer.
- Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-based policy: A practical guide to doing it better*. Oxford University Press.
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry*. Routledge.
- Clarke, A., & Francoli, M. (2017). Digital Government. *Permanent Campaigning in Canada*, 241.
- Crawford, G. (2003). Partnership or power? Deconstructing the 'partnership for governance reform' in Indonesia. *Third World Quarterly*, 24(1), 139-159.
- French, R. D. (2019). Is it time to give up on evidence-based policy? Four answers. *Policy & Politics*, 47(1), 151-168.
- Gulbrandsen, K. E. (2009). Bridging the valley of death: The rhetoric of technology transfer.
- Hage, J., Mote, J. E., & Jordan, G. B. (2013). Ideas, innovations, and networks: a new policy model based on the evolution of knowledge. *Policy Sciences*, 46(2), 199-216.
- Harkrisnowo, H. (2003). Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara.

- Hoover, S. A. (2018). When we know better, we don't always do better: Facilitating the research to practice and policy gap in school mental health. *School mental health, 10*(2), 190-198.
- Kingdon, J. W. (2011). Agendas, alternatives, and public policies. Updated. *Glenview, IL: Pearson, 128*, 251-257.
- Krumer-Nevo, M. (2008). From noise to voice: How social work can benefit from the knowledge of people living in poverty. *International Social Work, 51*(4), 556-565.
- McGann, James G., "2019 Global Go To Think Tank Index Report" (2020). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 17.
- Meyer, M. (2010). The rise of the knowledge broker. *Science communication, 32*(1), 118-127.
- Mihradi, R. M. (2011). *Kebebasan informasi publik versus rahasia negara*. Ghalia Indonesia.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Nachiappan, K., Mendizabal, E., & Datta, A. (2010). Think tanks in East and Southeast Asia.
- Nurhidayati, D. (2019). Does Digital Public Service Complaint Promote Accountability? A Comparative Analysis of Upik Yogyakarta and Qlue Jakarta. *Policy & Governance Review, 3*(2), 127-141.
- Parkhurst, J. (2017). *The politics of evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
- Stebbins, R. A. (2001). *Exploratory research in the social sciences* (Vol. 48). Sage.
- Pellini, A., Prasetyamartati, B., Nugroho, K. P., Jackson, E., & Carden, F. (Eds.). (2018). *Knowledge, Politics and Policymaking in Indonesia*. Springer.
- Reiter, B. (2017). Theory and methodology of exploratory social science research. *International Journal of Science and Research Methodology, 5*(4), 129.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. sage.
- SMERU Research Institute (2011). *Menjembatani Penelitian dan Kebijakan melalui Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti*. Newsletter No. 32 Sep-Dec/2011.
- Stebbins, R. A. (2008). Exploratory research. *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods, 1*, 327-329.
- SintaRistekBRIN. (2020) Jumlah afiliasi peneliti, jumlah peneliti dan jumlah jurnal ilmiah di Indonesia. Diakses dari <http://sinta.ristekbrin.go.id> 20 Maret 2020.
- Smith, K. (2013). *Beyond evidence based policy in public health: The interplay of ideas*. Springer.
- Stebbins, R. A. (2001). *Exploratory research in the social sciences* (Vol. 48). Sage.
- Undang-Undang Statistik No. 16 Tahun 1997.
- Wessner, C. W. (2005). Driving innovations across the valley of death. *Research-Technology Management, 48*(1), 9-12.
- Whyte, W. F., Greenwood, D. J., & Lazes, P. (1991). Participatory action research: Through practice to science in social research. *Participatory action research, 19*-55.

Zhang, L., Li, H., & Chen, K. (2020, March). Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China. In *Healthcare* (Vol. 8, No. 1, p. 64). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Kemajuan Studi

Artikel Jurnal:

1. The science openness movement in Indonesia: An introduction for re-reading civil society in policy discourse. DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2325
2. Mainstreaming ideas: Alternative reading of state and civil society in policy making. DOI: 10.24198/cosmogov.v6i1.25474

Artikel Populer:

1. Kita Bukan Anti-Sains, Hanya Kurang Total Ber-Sains
<https://ibtimes.id/kita-bukan-anti-sains-hanya-kurang-total-ber-sains/>
2. Sains dan Kepemimpinan: Problem Utama Kebijakan Covid-19
<https://ibtimes.id/sains-dan-kepemimpinan-problem-utama-kebijakan-covid-19/>
3. Covid-19 dan Urgensi Sains Terbuka
Suara Merdeka Cetak, 6 Maret 2020
4. Sebuah Provokasi dari Tim Sains Terbuka
<https://ibtimes.id/sebuah-provokasi-dari-tim-sains-terbuka/>
5. Jurus Jitu “Mengakali” Scopus
<https://ibtimes.id/jurus-jitu-mengakali-scopus/>
6. Membangkitkan Marwah Ilmu
<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/199558/membangkitkan-marwah-ilmu>
7. “Keistimewaan” Sarjana Sosial
Suara Merdeka Cetak, 23 Mei 2019